

Sistem Pendidikan di Indonesia Pada Masa Portugis dan Belanda

by Dea 31

Submission date: 22-May-2023 09:30AM (UTC+0700)

Submission ID: 2098775355

File name: 470-1731-1-PB.pdf (222.58K)

Word count: 3287

Character count: 21352



Sistem Pendidikan di Indonesia pada Masa Portugis dan Belanda

Riska^{1✉}, Hudaidah²

Universitas Sriwijaya, Indonesia^{1,2}

E-mail : cekriskal2@gmail.com¹, hudaidah@fkip.unsri.ac.id²

Abstrak

Artikel ini membahas tentang sejarah sistem pendidikan di Indonesia pada masa Portugis dan Belanda, yakni pada abad 16-20. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menambah pengetahuan tentang latar belakang terbentuknya pendidikan di Indonesia serta menguraikan tentang bagaimana sistem pendidikan di Indonesia pada abad 16-20. Dalam penelitian ini digunakan metode sejarah, yaitu metode yang terdiri dari proses tahapan heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian yang didapat adalah terjalannya hubungan antara bangsa Indonesia dengan bangsa Eropa yang disebabkan oleh kemajuan zaman menimbulkan dampak yang luas dalam berbagai bidang termasuk pendidikan. Pada tahun 1536, untuk pertama kalinya sistem pendidikan berbentuk sekolah didirikan di Indonesia tepatnya di Maluku oleh penguasa Portugis, yakni Antonio Galvano. Setelah berakhirnya masa pemerintahan Portugis, datanglah masa pemerintahan baru, yaitu pemerintahan Belanda. Pada saat itu, Belanda mendirikan sistem kongsi dagang yang biasa kita kenal dengan sebutan VOC. VOC memiliki tanggung jawab untuk memajukan agama. Untuk menunjang keberhasilan dalam menyebarkan agamanya, VOC mulai mendirikan sekolah-sekolah di Indonesia.

Kata Kunci: sistem, pendidikan, portugis, belanda.

Abstract

This article discusses the history of the education system in Indonesia during the Portuguese and Dutch times, namely in the 16-20 century. The purpose of writing this article is to increase knowledge about the background of the formation of education in Indonesia and describe how the education system in Indonesia in the 16-20 century. In this study, the historical method is used, namely the method which consists of the heuristic, criticism, interpretation, and historiographic stages of the process. The result of this research is that the relationship between the Indonesian nation and the European nation is established due to the progress of the times which has had a wide impact in various fields including education. In 1536, for the first time an education system in the form of a school was established in Indonesia to be precise in Maluku by the Portuguese ruler, namely Antonio Galvano. After the end of the Portuguese rule, came a new period of government, namely the Dutch government. At that time, the Dutch established a trading partnership system which we commonly know as the VOC. The VOC has a responsibility to promote religion. To support its success in spreading its religion, the VOC began to establish schools in Indonesia.

Keywords: system, education, portugis, belanda.

Copyright (c) 2021 Riska, Hudaidah

✉ Corresponding author

Email : cekriskal2@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i3.470>

ISSN 2656-8063 (Media Cetak)

ISSN 2656-8071 (Media Online)

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan, kualitas, dan keterampilan seseorang menuju ke hal-hal positif. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa Pendidikan adalah upaya terencana untuk menciptakan situasi belajar dan proses pembelajaran ^gupaya peserta didik dapat mengembangkan potensinya untuk mempunyai kecerdasan, kepribadian, ^gserta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Singkatnya, ^gpendidikan merupakan proses pembelajaran untuk mengembangkan potensi seseorang untuk mencapai tujuan yang positif.

Pendidikan adalah sarana untuk memajukan semua bidang kehidupan manusia di Indonesia, baik dalam bidang ekonomi, sosial, teknologi, keamanan, budaya, maupun kejayaan bangsa (Ilham, 2020). Dengan pengertian tersebut maka dapat dikatakan bahwa pendidikan dapat berpengaruh dalam semua aspek kehidupan. Dari sejumlah fakta positif atas modal besar yang dimiliki bangsa Indonesia, jumlah penduduk yang besar menjadi modal yang sangat penting karena kemajuan dan kemunduran suatu bangsa sangat bergantung pada faktor manusianya (SDM) (Ilma, 2015). Dalam hal ini artinya pendidikan dapat dijadikan sebagai cerminan masa depan suatu bangsa. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan sangat berguna bagi bangsa itu sendiri, untuk itu diperlukan sistem pendidikan dalam menciptakan SDM yang berkualitas untuk memajukan suatu bangsa.

Sistem pendidikan adalah kesatuan komponen-komponen yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan (Supendi, 2016). Beberapa komponen dalam sistem pendidikan yaitu peserta didik, tujuan pendidikan, alat dan sumber belajar, manajemen, biaya pendidikan, dan masih banyak lagi. Komponen-komponen yang ada di dalam sistem pendidikan mempunyai fungsinya masing-masing dan sangat berpengaruh atas kelancaran jalannya sistem pendidikan tersebut. Saat ini hampir seluruh wilayah di Indonesia terdapat sistem pendidikan berbentuk sekolah. Sesuai dengan kemajuan zaman, pelaksanaan sistem pendidikan Indonesia di daerah-daerah besar telah menggunakan teknologi yang canggih misalnya, terdapat LCD proyektor, Lab komputer, wifi, dan sebagai ^gya. Di Indonesia Penyelenggaraan pendidikan nasional diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ^g pasal 31 ayat 1 yang berisi “setiap warga negara berhak ^g mendapatkan pendidikan”. Dengan adanya undang-undang tersebut, setiap masyarakat Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan untuk menunjang pelaksanaannya didirikan suatu program wajib belajar Sembilan tahun, yakni SD dan SMP sederajat.

Berbeda dengan saat ini, pada zaman penjajahan khususnya pada masa pemerintahan Portugis dan Belanda, pendidikan hanya diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja, yaitu untuk golongan bangsawan dan petinggi negara. Masyarakat biasa tidak diperbolehkan untuk mengenyam pendidikan di masa itu karena dianggap tidak pantas sehingga pendidikan di Indonesia tidak berjalan dengan baik serta tidaklah merata. Ada banyak unsur diskriminasi dalam sistem pendidikan pada zaman tersebut, sistem pendidikan didirikan semata-mata hanya untuk kepentingan negara penjajah, misalnya untuk menjadikan masyarakat pribumi sebagai alat untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara mencetak tenaga kerja dengan upah yang murah. Pada abad 16-17 terdapat lembaga-lembaga pendidikan dengan tujuan menyebarkan agama Kristen di Indonesia, pendidikan tersebut didirikan untuk bangsa Belanda dan pribumi. munculnya lembaga pendidikan tersebut pihak kompeni membutuhkan pekerja rendahan yang bisa membaca dan menulis (Wahyuni, 2015).

Pada zaman Belanda, faktor politik sangat mempengaruhi terlaksananya pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan yang dibangun oleh pemerintah Belanda bagi bangsa Indonesia ditentukan berdasarkan politik Belanda khususnya dalam pertimbangan ekonomi. Kebijakan dalam bidang pendidikan selalu berkaitan dengan pola politik penjajahannya. Pemerintah Belanda memiliki sikap netral terkait pendidikan agama di sekolah umum. Pengajaran umum adalah netral, maksudnya pengajaran itu dilaksanakan dengan sikap saling menghormati keyakinan agama masing-masing. Hanya diluar sekolah saja, Pengajaran agama diberikan menurut Daulay (Tirolian, 2016). Akan tetapi, pada masa itu sistem pendidikan yang tersedia berupa

pendidikan bergaya barat dan dibagi menjadi beberapa tingkatan misalnya MULO, HIS, ELS, dan lain sebagainya. Dilihat dari sini maka dapat dibayangkan betapa kentalnya diskriminasi pendidikan yang terjadi pada zaman dahulu.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menguraikan latar belakang didirikannya sistem pendidikan di Indonesia serta mendeskripsikan bagaimana sistem pendidikan di Indonesia pada masa pemerintahan Portugis dan Belanda, yaitu pada abad 16-20. Penelitian ini penting dilakukan karena menyangkut sejarah sistem pendidikan di Indonesia yang juga menjadi cikal bakal sistem pendidikan Indonesia saat ini. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi penunjang dalam menambah wawasan terkait sejarah sistem pendidikan di Indonesia pada masa lampau khususnya pada masa pemerintahan Portugis dan Belanda serta dapat menjadi suatu renungan bagi kita untuk tetap bersyukur atas adanya kesempatan dalam mengenyam pendidikan bagi seluruh golongan masyarakat yang ada.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah (*historis*) untuk mencari, mengumpulkan, membuktikan, menafsirkan, serta menyajikan hasil rekonstruksi imajinatif masa lampau sesuai dengan jejak-jejaknya. Pada penelitian ini, metode sejarah digunakan agar dapat mengupayakan sumber terpercaya sehingga menghasilkan sebuah karya yang jelas kebenarannya. Metode sejarah adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid dengan menggunakan beberapa teknik, yakni heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber (verifikasi), interpretasi (penafsiran), dan historiografi (penulisan) (Amar, 2017). Heuristik (pengumpulan sumber) merupakan proses mencari dan mengumpulkan sumber yang berhubungan erat dengan objek penelitian sebagai bahan-bahan dari penelitian itu sendiri. Kritik sumber (verifikasi) yaitu proses dengan mengkritisi dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan untuk dibuktikan otentisitas dan kredibilitasnya. Interpretasi (penafsiran) atau sintesis adalah kegiatan untuk menafsirkan fakta-fakta dan menentukan makna. Historiografi (penulisan) merupakan tahapan yang berisi hasil penafsiran dari fakta-fakta itu menjadi sebuah kisah sejarah yang selaras (Hedriani, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dimulai pada abad ke 16 datanglah berduyun-duyun pedagang bangsa Eropa di Asia Tenggara. Untuk pertama kalinya bangsa Portugis berlabuh di Asia Tenggara pada tahun 1509, tepatnya di kota kerajaan Malaka, mereka datang sebagai akibat dari perang salib terhadap kaum muslim, tetapi juga mendapat keuntungan yang besar dari perdagangan lada dan rempah-rempah. Bangsa Portugis menyerang Malaka pada tahun 1511 dan selanjutnya menaklukkan Malaka dengan tujuan menguasai lada dan rempah-rempah yang bersumber dari kota kerajaan Malaka. Menurut Hall (Sulaiman et al., 2018). Pada tahun 1512, dibawa pimpinan De Abreau, bangsa Portugis menuju Maluku dan dalam perjalanannya, bangsa Portugis juga singgah di beberapa pelabuhan seperti Aceh, Banten, Sunda Kelapa, Cirebon, Demak, Gresik dan akhirnya sampai ke Ternate. Akan tetapi, dengan kedatangan bangsa Belanda pada tahun 1596 di Asia Tenggara, perdagangan Portugis segera terdesak dan akhirnya Malaka jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1641, dan Portugis terusir dari wilayah Maluku.

Pada abad ke-16, sebelum kedatangan orang Belanda, Bangsa Portugis ingin menguasai perdagangan Timur-Barat dengan cara menemukan jalan laut menuju dunia Timur dan menguasai Bandar dan daerah strategis yang menjadi mata rantai perdagaan dan perniagaan menurut Mudyahardjo (Purba, 2018). Selain mencari kekayaan (*gold*) dan kejayaan (*glory*), bangsa Portugis datang ke Timur (termasuk Indonesia) bertujuan menyebarkan agama yang, yakni Katholik (*gospel*). Pedagang Portugis menetap di tempat rempah-rempah yang mahal dihasilkan, yakni bagian Timur Indonesia, biasanya mereka didampingi oleh misionaris.

Untuk menyebarluaskan agama Katolik di Indonesia, para misionaris membangun sistem pendidikan berbentuk sekolah. Ide ini dicetuskan oleh seorang misionaris bernama Franciscus Xaverius, yang dianggap sebagai peletak batu pertama Katolik di Indonesia. Pada 1536, di Ternate berdiri sekolah yang mengajar dan membimbing bibit-bibit misionaris/pekerja agama. Pada 1536 juga, penguasa Portugis bernama Antonio Galvano membangun sekolah seminari untuk anak-anak dari petinggi pribumi di Maluku. Sekolah yang sama juga dibangun di Pulau Solor dan banyak muridnya mencapai 50 orang. Sekolah ini juga menggunakan bahasa Latin. Meskipun begitu, belum ditemukan secara nyata bahasa apa yang digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah tersebut. Dapat dikatakan bahwa masalah bahasa pengantar merupakan salah satu kesulitan bahkan dalam sistem pendidikan di sekolah-sekolah yang dibangun oleh bangsa Portugis. Murid-murid yang bergolongan pribumi yang dapat mengikuti studi dengan lancar serta ingin melanjutkan studi, dapat melanjutkan studinya di Goa, pusat kekuatan Portugis di Asia (Syaharuddin & Susanto, 2019).

Kala itu, penyelenggaraan pendidikan kurang mendapat kemajuan yang berarti. Salah satu faktor penyebabnya yaitu karena hubungan orang Portugis dengan orang Ternate semakin kurang baik, di samping itu pula mereka masih harus bersaing dan berperang melawan bangsa Spanyol dan Inggris. Hal ini dapat menjadi kesempatan bagi Belanda untuk menguasai Ternate. Bangsa Belanda kemudian menggantikan kedudukan bangsa Portugis dengan strategi yang terencana dengan menerapkan bahasa Belanda dan bahasa Melayu (yang berkembang menjadi bahasa Indonesia) pada sekolah-sekolahnya. Dengan berakhirnya bangsa Portugis di Nusantara, maka sistem pendidikan di Indonesia dikuasai oleh Belanda, tetapi masih tetap berbasis keagamaan.

Sejak kehadiran Belanda selaku penguasa politik di Nusantara, berbagai kebijakan berbentuk imperialisme muncul sebagai kesatuan dalam semua aktivitas kolonial dengan keinginan menguasai wilayah kolonialnya secara sungguh-sungguh. Ambisi pemerintah kolonial untuk mengeksploitasi daerah jajahan memerlukan SDM yang terdidik. Oleh karena itu, muncul kebijakan dan usaha pemerintah kolonial untuk memperluas pendidikan dalam rangka menciptakan tenaga-tenaga kerja yang terdidik dengan upah murah. Dengan cepatnya perkembangan perekonomian Barat yang ada di Hindia Belanda, maka diselenggarakanlah pendidikan bagi rakyat pribumi oleh pemerintah Belanda dengan tujuan untuk membina tenaga kerja yang terampil dan dapat dipekerjakan pada perusahaan dan bidang lainnya (Siregar, 2016).

Pada tahun 1899, artikel berjudul "Hutang Kehormatan" (*Een Eereschuld*) yang dibuat oleh bangsa Belanda yang bernama Van Deventer diterbitkan, artikel ini berisi tentang kekhawatiran kaum intelektual Belanda terhadap ras perikemanusiaannya kepada penduduk nusantara. Artikel inilah yang memicu munculnya kebijakan Politik Etis (Politik Balas Budi) dilaksanakan di Nusantara pada tahun 1901 yang berakar dari dua kebijakan sebelumnya yaitu Sistem Tanam Paksa (1830-1870) dan Politik Liberal (1870-1900). Politik Etis mengakibatkan turunnya kesejahteraan pribumi, hal ini disebabkan karena banyak penyimpangan pada program penting Trias Van Deventer yang merangkum kebijakan politik etis itu sendiri. Salah satu program yang termuat dalam Trias Van Deventer adalah edukasi atau pendidikan. Edukasi menjadi program yang sangat berpengaruh bagi masyarakat di nusantara. Pelaksanaan program ini diterapkan dengan pendidikan gaya Barat. Kebijakan Politik Etis hanya dipusatkan pada bidang pendidikan karena bidang pendidikan penting untuk ditingkatkan. Hal ini bisa diamati ketika status priyayi hanya dapat diperoleh karena faktor keturunan, tetapi setelah dilaksanakannya Politik Etis ini masyarakat pribumi yang bukan priyayi dapat menggunakannya melalui pendidikan yang tinggi. Sama halnya dengan tenaga kerja yang diperlukan khususnya di bidang industri sangat dibutuhkan dari orang-orang yang mempunyai pendidikan (Prayudi & Salindri, 2015).

Politik pendidikan kolonial yang terlaksana di Indonesia terdiri dari beberapa ciri-ciri pokok. Ciri-ciri umum tersebut, yakni gradualisme, dualisme, kontrol sentral, keterbatasan tujuan, prinsip konkordinasi, dan tidak adanya rencana pendidikan. Gradualisme adalah sikap lamban pemerintah kolonial Belanda untuk melakukan dinamika pendidikan. Dualisme adalah perbedaan pendidikan antara penduduk pribumi dengan bangsa Belanda. Kontrol sentral yang kuat adalah tindakan Gubernur jenderal dalam mengatur kebijakan

pendidikan. Keterbatasan tujuan artinya tujuan dari sekolah itu sendiri hanya untuk menghasilkan pekerja rendahan. Prinsip konkordinasi yaitu Indonesia dan Belanda mempunyai kurikulum yang sama. Tidak ada perencanaan pendidikan sistematis berarti tidak ada hubungan antar sekolah sehingga tidak ada kesempatan untuk melanjutkan jenjang studi menurut Salindri (Heru sofyon et al., 2014).

Munculnya suatu sistem pendidikan tidak hanya datang dari suatu proses perencanaan belaka tetapi juga melalui tahapan dan proses yang sangat panjang dan didorong dengan kebutuhan yang mencakup beberapa aspek penting pada pemerintahan Belanda kala itu. Sistem pendidikan pada masa Belanda mencakup beberapa tingkatan yang didasarkan atas lapisan ataupun kelas suatu masyarakat. Tingkatan pendidikan di Inonesia pada zaman Belanda pada tahun 1900-1942 terdiri dari 3, yaitu : Pendidikan Rendah (*Lager Onderwijs*), Pendidikan Menengah (*Middlebaar Onderwijs*), dan Perguruan Tinggi (*Vokonderwijs*).

Pendidikan Rendah (*Lager Onderwijs*) dapat disebut sebagai sekolah dasar. Pada tahun 1892 terjadi penyusunan kembali pada kebijakan dunia pendidikan di Indonesia. Dalam kebijakan tersebut memuat bahwa terdapat pendidikan dasar yakni yang pertama untuk bangsawan dengan bahasa pengantarnya bahasa Belanda yang dikenal dengan kelas satu, yang ke dua untuk rakyat jelata dengan bahasa pengantar daerah yang dikenal dengan kelas dua, dan yang ketiga adalah sekolah desa sebagai bentuk keinginan pemerintah untuk memperluas pendidikan dengan biaya serendah mungkin untuk penduduk Indonesia dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Pada pendidikan dasar kelas satu terbagi lagi menjadi HIS, HCS, dan ELS. HIS (*Hollands Inlandse School*) pertama kali didirikan pada tahun 1914, Sekolah ini disediakan untuk golongan bangsawan asli Indonesia. HCS (*Hollands Chinese School*) didirikan pada tahun 1908 diperuntukkan bagi orang timur asing khususnya keturunan Cina. ELS (*Europese Lagere School*) didirikan pada tahun 1818 untuk keturunan timur asing, orang Eropa, maupun bumi putra. Ketiga sekolah tersebut sama-sama mempunyai waktu sekolah selama tujuh tahun (Wiranata et al., 2018).

Pendidikan Menengah (*Middlebaar Onderwijs*) atau pendidikan lanjutan terbagi menjadi tiga yaitu MULO, AMS, dan HBS. MULO (*Meer Uit Gebreid Lager School*) adalah sekolah lanjutan dari sekolah dasar berbahasa pengantar Belanda yang didirikan pada tahun 1914 dengan waktu belajar tiga sampai empat tahun. AMS (*Algemene Middelbare School*) adalah sekolah menengah umum yang dibangun pada tahun 1915 sebagai sekolah lanjutan dari MULO yang menggunakan bahasa Belanda dan disediakan bagi golongan bumi putra dan Timur asing dengan waktu belajar selama tiga tahun. HBS (*Hoogere Burger School*) adalah sekolah menengah yang didirikan pada tahun 1860 sebagai sekolah lanjutan dari ELS (*Europese Lagere School*) yang disediakan untuk golongan Eropa (Sultani, Z. I.M & Kristanti, 2020).

Perguruan Tinggi (*Vonkonderwijs*). Perguruan Tinggi (*Vonkonderwijs*) terdiri dari tiga yakni Sekolah Teknik Tinggi (*Technische Hoge School*), Sekolah Hakim Tinggi (*Rechskundige Hoge School*), dan Pendidikan tinggi kedokteran (Nasution, 2011).

Apabila dilihat dari sudut pandang terkait tingkatan pendidikan di Indonesia pada zaman Belanda yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa terlihat jelas adanya perbedaan perlakuan bagi setiap golongan masyarakat, baik bagi anak-anak yang berasal dari Eropa, Cina, maupun pribumi. Hal ini dapat disadari dengan melihat peluang kesempatan dalam memasuki sekolah antara golongan bangsawan dengan pribumi yang berbeda. Kondisi tersebut terjadi karena adanya aturan dan kebijakan tertentu khususnya terkait biaya yang relatif mahal sehingga masyarakat pribumi keberatan untuk memasuki sekolah khusus anak Eropa dan bangsawan.

KESIMPULAN

Sejarah sistem pendidikan di Indonesia berbentuk sekolah mulai didirikan pada abad 16 yaitu pada masa pemerintahan Portugis. Sistem pendidikan di Indonesia dilatarbelakangi oleh keinginan bangsa eropa untuk menghasilkan tenaga kerja ataupun pegawai dengan upah kecil. Sistem pendidikan pada masa Portugis dan Belanda sama-sama bernuansa keagamaan. Akan tetapi, berbeda dengan Portugis, pada masa

pemerintahan Belanda, pengajaran agama dianggap netral di sekolah umum. Sampai seiring waktu terdapat beberapa tingkatan pendidikan pada masa Belanda, yakni Pendidikan Rendah (*Lager Onderwijs*), Pendidikan Menengah (*Middlebaar Onderwijs*), dan Perguruan Tinggi (*Vokonderwijs*). Adapun ciri-ciri umum pendidikan colonial Belanda yakni, gradualisme, dualisme, kontrol sentral, keterbatasan tujuan, prinsip konkordinasi, dan tidak adanya rencana pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amar, S. (2017). Perjuangan Gender dalam Kajian Sejarah Wanita Indonesia Pada Abad XIX. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan*, 1(2), 106–119. <https://doi.org/10.29408/fhs.v1i2.587>
- Hedriani, E. (2016). Metode Sejarah Dalam Penelitian Tari. *Jurnal Seni Makalangan*, 3(2), 33–45.
- Heru sofyan, shidiq fajar, Sumardi, & Umamah, N. (2014). Sistem Pendidikan Kolonial Belanda di Indonesia Tahun 1900-1942. *Universitas Jember*.
- Ilham, D. (2020). Persoalan-Persoalan Pendidikan dalam Kajian Filsafat Pendidikan Islam. *Didaktika*, 9(2). <https://jurnaldidaktika.org/179>
- Ilma, N. (2015). Peran Pendidikan Sebagai Modal Utama Membangun Karakter Bangsa. *TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, IAIN Sultan Amai Gorontalo*, 3(1), 82–87. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi>
- Nasution, S. (2011). Strategi Pendidikan Belanda Pada Masa Kolonial di Indonesia. *Ihya Al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab*, 2(2), 254–258. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ihya/article/view/431/333>
- ⁴ Prayudi, G., & Salindri, D. (2015). Pendidikan Pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda Di Surabaya Tahun 1901-1942 (Education on Dutch Government in Surabaya At 1901-1942). *Publika Budaya*, 3(1), 20–34. <https://core.ac.uk/download/pdf/290559825.pdf>
- ⁶ Purba, J. T. H. (2018). *Pendidikan Nusantara pada Masa Portugis dan VOC*. www.Historical577.Com. <https://historical577.wordpress.com/2018/04/06/pendidikan-nusantara-pada-masa-portugis-dan-voc/>
- ⁵ Siregar, E. (2016). Kebijakan pemerintah Hindia Belanda mengenai pendidikan bagi kaum bangsawan di Indonesia tahun 1900-1920. *Jurnal Education and Development STKIP Tapanuli Selatan*, 3(1).
- ¹ Sulaiman, H., Rema, F. X., & Anita, A. (2018). Menelusuri Jejak Sejarah Peninggalan Portugis Di Kampung Numba. *HISTORIA Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 6(2), 237. <https://doi.org/10.24127/hj.v6i2.1528>
- ⁴ Sultani, Z. I.M & Kristanti, Y. P. (2020). PERKEMBANGAN DAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN ZAMAN KOLONIAL BELANDA DI INDONESIA ABAD 19-20. *Jurnal Artefak*, 7(2), 141–152.
- Supendi, P. (2016). Variasi (Format) Sistem Pendidikan di Indonesia. *Almufida*, 1(1), 159–181. <http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/almufida/article/view/110>
- ⁶ Syaharuddin, & Susanto, H. (2019). Sejarah Pendidikan Indonesia. In *Program Studi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat* (Vol. 53, Issue 9).
- ⁴ Tirolian. (2016). *Kolonialisme dan Dikotomi Pendidikan Islam di Indonesia*. 68–70.
- Wahyuni, F. (2015). *KURIKULUM DARI MASA KE MASA (Telaah Atas Pentahapan Kurikulum Pendidikan di Indonesia)*. 278(1–2), 249–253. <https://doi.org/10.1023/A:1013199923212>
- Wiranata, P., Safitri, S., & Sair, A. (2018). PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI PALEMBANG PADA TAHUN 1942-1950 (SUMBANGAN MATERI PEMBELAJARAN MATA KULIAH SEJARAH PENDIDIKAN) Pandu. *Jurnal Criksetra*, 1950.

Sistem Pendidikan di Indonesia Pada Masa Portugis dan Belanda

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	fkip.ummetro.ac.id Internet Source	3%
2	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	3%
3	www.tulisanbagus.my.id Internet Source	3%
4	jbasic.org Internet Source	2%
5	journal.ipts.ac.id Internet Source	2%
6	journal.kurasinstitute.com Internet Source	2%
7	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	2%
8	yjanuariko.blogspot.com Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off